

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan hal yang sangat mutlak dan harus dilaksanakan, jika suatu bangsa ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian, pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan kompleksitas yang tinggi tidak memungkinkan pembangunan dilakukan secara serentak dengan penekanan yang sama pada berbagai bidang (fitra, 2007:1).

Pada umumnya pembangunan nasional di banyak negara terutama negara sedang berkembang, lebih ditekankan pada pembangunan di bidang ekonomi. Alasannya karena pembangunan di bidang ekonomi akan dapat mendorong pencapaian tujuan serta pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di negara tersebut. Selain itu, meningkatnya hasil-hasil di bidang ekonomi akan dapat menyediakan sumber dana bagi pembangunan sehingga dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan (Tjokroamidjojo, 1996: 44).

Pada kenyataannya, pembangunan ekonomi tidak hanya memberikan dampak positif yang berupa kemajuan tetapi juga memberikan dampak negatif pada kehidupan ekonomi masyarakat mengingat bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan redistribusi pendapatan yang merata, khususnya bagi negara berkembang, sehingga dapat memicu munculnya jumlah penduduk miskin. Dimana menurut

Sharp (1996:173-191) penyebab kemiskinan ada tiga faktor yaitu perbedaan sumber daya alam dan manusia, serta perbedaan akses modal.

Tujuan pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena mengingat adanya berbagai masalah mendesak seperti kemiskinan yang semakin tinggi dan ketimpangan pendapatan yang semakin mencolok. Dengan demikian menurut Todaro bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan pertumbuhan GNP setinggi-tingginya, melainkan pengurangan/penghapusan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2004: 209).

Mengingat kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat proses pembangunan ekonomi di Negara berkembang pada umumnya, maka menjatuhkan pilihan pembangunan kepada orang miskin sangatlah penting dalam proses pembangunan itu sendiri, oleh karena golongan penduduk miskin inilah yang menderita kemunduran dalam pembagian pendapatan selama proses pembangunan, sedangkan jumlahnya tidak saja besar tetapi akibat pertumbuhan penduduk senantiasa meningkat. Masa depan kelompok penduduk miskin ini tidak bertambah baik, tetapi sebaliknya (Salim, 1976: 12). Terbatasnya kesempatan kerja merupakan salah satu penyebab seseorang menjadi miskin karena peluang untuk memperoleh pendapatan menjadi semakin kecil.

Menurut Simatupang dan Saktyanu dalam Zaidi (2013: 1-2), Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan

yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan masalah yang ada secara nasional, yakni masih tingginya angka kemiskinan. Jika di bandingkan dengan provinsi lain, Jawa Timur pada tahun 2012 memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi di antara 6 propinsi, lihat Tabel 1.1. Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan, upaya peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi sebuah target utama dalam suatu pemerintahan. Berbagai strategi dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya mengurangi kemiskinan.

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan Enam Propinsi di Pulau Jawa Bulan September
tahun 2012

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Kota+Desa (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	DKI	366,77	3,7
2	DIY	562,11	15,88
3	Banten	648,25	5,71
4	Jawa Barat	4.421,48	9,89
5	Jawa Tengah	4.863,41	14,98
6	Jawa Timur	4.960,54	13,08

Sumber: BPS Indonesia, 2013

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan persentase kemiskinan enam provinsi di pulau Jawa tahun 2012. Provinsi terbanyak yaitu provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.960,54 jiwa dengan jumlah persentase penduduk miskin sebesar 13,08%. Sedangkan provinsi paling sedikit yaitu provinsi DKI dengan jumlah penduduk miskin sebesar 366,77 jiwa dengan jumlah persentase penduduk miskin sebesar 3,7%.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam menfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi sebuah target utama dalam suatu pemerintahan. Berbagai strategi dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya mengurangi kemiskinan.

Dalam kurun waktu setahun, persentase penduduk miskin di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,83 poin persen atau menjadi 13,40 persen pada tahun 2012. Angka persentase tersebut diatas target kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penurunan persentase tersebut menunjukkan penduduk miskin pada tahun 2012 sebanyak 5.070,98 ribu jiwa atau turun sebesar 285,23 ribu jiwa dari tahun 2011. Penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat pusat atau kedaerahan. Adapun program pusat antara lain PNPM Perkotaan maupun perdesaan, Program Keluarga Harapan, Perbantuan Pemodalan. Sementara itu program pengentasan kemiskinan yang bersifat kedaerahan misalnya Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (BPS Jawa Timur).

Penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat pusat atau kedaerahan. Adapun program pusat antara lain PNMP perkotaan maupun pedesaan. Program Keluarga Harapan, Perbantuan Pemodalan. Sementara itu program pengentasan kemiskinan yang bersifat kedaerahan misalnya Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra). Disamping itu juga berbagai inovasi yang dilakukan daerah otonom untuk mengentaskan kemiskinan misalkan pembangunan jalan poros desa (misal Kab Tuban dan Lumajang), optimalisasi dan fokusitas dana CSR (Kab. Jombang). Lihat tabel 1.2.

Tabel 1.2
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin Menurut
Daerah di Jawa Timur, Maret 2008 s/d Maret 2012

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)
	Makanan	Bukan Makanan	Total			
Kota+Desa						
Maret 2008	125.091	44.020	169.112	7.019,95	18,51	-1,47
Maret 2009	138.442	49.874	188.317	6.022,59	16,68	-1,83
Maret 2010	146.240	53.087	199.327	5.529,30	15,26	-1,42
Maret 2011	162.017	57.71	219.727	5.356,21	14,23	-1,03
Maret 2012	171.375	61.827	233.202	5.070,98	13,40	-0,83

Sumber: BPS, Diolah dari data Susenas Panel Maret 2008 s/d Maret 2012

Perkembangan penduduk miskin di Jawa Timur dari tahun ke tahun tidak lepas dari besarnya garis kemiskinan pada tahun bersangkutan. Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Garis kemiskinan pada tahun 2012 sebesar Rp. 233.202 atau mengalami kenaikan sebesar 6,13 persen. Garis kemiskinan (GK) terbagi menjadi 2 bagian yaitu GK makanan dan non makanan. GK makanan pada tahun 2012 sebesar Rp. 171.375 dan non makanan sebesar Rp.61.827. angka ini mengalami peningkatan besar 5,78 persen dan 7,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu dekomposisi GK, terlihat persentase kenaikan GK perdesaan (7,73 persen) lebih besar dari perkotaan (4,59 persen).

Menurut Todaro dalam penelitian Zaidi (2013: 5) mengemukakan bahwa Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi

semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output pendapatan nasional.

Salah satu aspek penting, dan sekaligus sasaran yang ingin dicapai oleh suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditandai kenaikan produk nasional bruto per kapita melebihi pertumbuhan penduduk pada tahun yang sama, adanya pemerataan pendapatan, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku proses pembangunan ekonomi. Strategi pertumbuhan ekonomi banyak dipakai di beberapa negara dalam pembangunan ekonomi. Salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai didalam proses pembangunan ekonomi adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2003: 40).

Menurut Lincoln Arsyad (1999:7) pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah :

1. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan PDB pada satu tahun tertentu dikurangi dengan pertumbuhan penduduk.
2. Perkembangan PDB yang terjadi dalam suatu negara disertai perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural).

Kondisi pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar akan berpengaruh terhadap kondisi sosial manusia di Jawa Timur. Permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan masih

diprioritaskan pada masalah-masalah sosial yang mendasar, antara lain besarnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000
Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2008-2012

No	Tahun	PDRB	Pertumbuhan Ekonomi
1	2008	305,538,686.62	5,94
2	2009	320,861,168.91	5,01
3	2010	342,280,764.89	6,68
4	2011	366,983,277.46	7,22
5	2012	393,666,437.37	7,27

Sumber: BPS Jawa Timur, Indikator Makro Ekonomi tahun 2008-2012, diolah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Jumlah penduduk yang terus bertambah juga merupakan masalah di Indonesia apalagi jika peningkatan tersebut dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini akan meningkatkan pengangguran yang pada akhirnya menciptakan penduduk miskin mengingat bahwa di Indonesia pada umumnya, dan di Jawa Timur pada khususnya masih terdapat banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Nuryeni, 2008: 9).

Pertumbuhan penduduk juga dapat memperlambat pembentukan modal, karena jika penduduk meningkat maka pendapatan per kapita yang didapat akan menurun. Peningkatan penduduk ini menyebabkan pengalihan investasi modal dan kegiatan produktif langsung menjadi modal *overhead* sosial. Kesimpulannya, pertumbuhan penduduk yang meningkat cepat akan memperlambat usaha

pembangunan kecuali jika dibarengi dengan laju pembentukan modal dan kemajuan teknologi yang tinggi (Jhingan, 2004: 409).

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Jawa Timur Tahun 2008-2012 (jiwa)

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2008	36.972.282
2	2009	37.236.149
3	2010	37.476.757
4	2011	37.687.622
5	2012	37.879.713

Sumber: Data Penduduk berdasarkan Hasil SP2010, BPS Propinsi Jawa Timur

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Jawa Timur tiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 36.972.282 jiwa, sedangkan pada tahun 2012 jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 37.879.713 jiwa.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk faktor lain yang sangat penting dalam mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh jika suatu bangsa menginginkan kemajuan. Menurut pengalaman negara berat pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama dalam mengembangkan pengetahuan melatih dan keahlian (Hadi Prayitno, 1986).

Tabel 1.5
Jumlah Persentase Angka Melek Huruf (AMH) Di Jawa Timur Tahun 2008-2012

No	Tahun	Angka Melek Huruf
1	2008	87,43
2	2009	87,80
3	2010	88,00
4	2011	89,23
5	2012	92,13

Sumber: LAKIP provinsi Jawa Timur 2013, diolah

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah menurun, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan (Winardi, 2010). Di Jawa Timur tingkat pendidikan dapat diukur salah satunya dengan besarnya Angka Melek Huruf. Dan berdasarkan Tabel 1.5 Angka Melek Huruf penduduk di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dimana jumlah angka melek huruf paling banyak yaitu pada tahun 2012 sebesar 92,13. Pencapaian tersebut semakin diperkuat dengan adanya peningkatan angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Pencapaian ini dikarenakan adanya program penuntasan buta aksara yang dilakukan secara berkesinambungan bekerjasama dengan mitra organisasi, saling bahu membahu untuk dapat menuntaskan buta aksara di Jawa Timur, disamping itu penuntasan buta aksara telah didukung pula dengan data *by name by address* yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan BPS Provinsi Jawa Timur, sehingga sasaraannya dapat diperoleh secara tepat.

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2008-2012.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan utama yang akan diteliti adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2008-2012?
2. Diantara (pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pendidikan) variabel manakah yang dominan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2008-2012?

1.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2008-2012.
2. Untuk mengetahui diantara (pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pendidikan) variabel manakah yang dominan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2008-2012.

1.1. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam merencanakan pembangunan selanjutnya antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan penekanan angka kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian-penelitian berikutnya tentang penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

1.2. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, dan secara garis besar diuraikan pembahasan dalam kerangka sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2008-2012. Diuraikan secara berurutan yang terdiri dari; latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika skripsi.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang diperoleh dari literatur-literatur yang dijadikan pedoman dan pembahasan, penelitian sebelumnya, model analisis dan hipotesis penelitian.

Bab III: METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang mencakup pembahasan tentang ruang lingkup serta perumusan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai objek penelitian, deskripsi variabel, hasil penelitian yang disertai pula dengan pembahasan, pembuktian hipotesis dan hasil akhir dari pengolahan data.

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup dari penulisan penelitian yang mengemukakan kesimpulan, yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dengan dasar kesimpulan tersebut, akan dikemukakan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.